

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

1	PENDAHULUAN	1
	Latar Belakang	1
	Perumusan Masalah	6
	Tujuan Penelitian	7
	Manfaat Penelitian	7
	Ruang Lingkup Penelitian	7
2	TINJAUAN PUSTAKA	8
	Tinjauan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi	8
	Investasi	9
	Obligasi	11
	Saham atau Ekuitas	13
	Resiko Investasi	13
	Teori Struktur Modal	14
	Proposisi I dan II tanpa Pajak	15
	Hutang	15
	Struktur Modal Optimal	16
	Deviden	17
	Kebijakan Deviden Irrelevant	17
	Kebijakan Deviden yang Relevan	18
	Bank	19
	Konsep Industri Perbankan	19
	Pengukuran Kinerja Perbankan	20
	Pertumbuhan Ekonomi	21
	Konsep Pertumbuhan Ekonomi	21
	Pendekatan Pengukuran Pendapatan Perkapita	23
	Keuangan Publik	24
	Keuangan Daerah	24
	Kebijakan Investasi Pemerintah Daerah	25
	Kajian Penelitian Terdahulu	27
3	METODE	29
	Data dan Sumber Data	29
	Kerangka Pemikiran Konseptual	29
	Model Analisis	30
4	PERKEMBANGAN PENYERTAAN MODAL DAERAH, KINERJA KEUANGAN DAERAH, KINERJA BANK PEMBANGUNAN DAERAH	34
	Penyertaan Modal Daerah	34
	Kinerja Keuangan Daerah	37
	Kinerja Bank Pembangunan Daerah	40
	Intisari	42



© Hak Cipta Milik IPB
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatatkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.

DAFTAR ISI (Lanjutan)

5	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
	Hasil Estimasi Model	44
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	47
	Realisasi Penerimaan Daerah	49
	Surplus	50
	Penyertaan Modal Daerah	51
	Deviden	52
	Laba Bank BPD	53
	Simulasi Kebijakan	57
	Validasi Model	57
	Dampak Kebijakan Tunggal	58
	Dampak Kebijakan Menambah Penyertaan Modal 3 Persen dan 10 Persen	58
	Dampak Kebijakan Menaikan Belanja Pegawai Bank (B_PEGAWAI) Jika 3 Persen dan Jika 10%	59
	Dampak Kebijakan Peningkatan Retribusi Daerah 3 Persen dan 10%	60
	Dampak Kebijakan Kombinasi	61
	Dampak Kebijakan Kombinasi Menaikan Penyertaan Modal dan Menaikkan Belanja Pegawai Masing-masing 3% dan 10% dan Kebalikannya 10% dan 3%	61
	Dampak Skenario Kebijakan Kombinasi Menaikan Belanja Pegawai dan Menaikkan Retribusi Daerah Provinsi Masing-masing 3% dan 10% dan Kebalikannya 10% dan 3%	62
	Dampak Skenario Kebijakan Kombinasi Meningkatkan Penyertaan Modal dan Meningkatkan Retribusi Daerah Provinsi Masing-masing 3% dan 10% dan Kebalikannya 10% dan 3%	63
	Dampak Skenario Kebijakan Kombinasi Meningkatkan Penyertaan Modal, Belanja Pegawai Bank dan Meningkatkan Retribusi Daerah Provinsi 3%, 3% dan 10% dan Kebalikannya 10%, 3% & 3%	64
	Implikasi Kebijakan	65
6	KESIMPULAN DAN SARAN	68
	Kesimpulan	68
	Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	71
	RIWAYAT HIDUP	83

© Hak Cipta Milik IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatatkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB.



SB-IPB

Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

DAFTAR TABEL

1	Ringkasan hasil penelitian terdahulu	27
2	Perbandingan persentase rata-rata realisasi belanja, realisasi PAD terhadap penyertaan modal pada Bank BPD pemerintah provinsi tahun 2010-2015	38
3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2010-2015 (dalam Trilyun rupiah)	40
4	Rata-rata bobot Kinerja 26 Bank BPD 2010-2015	43
5	Hasil estimasi parameter persamaan pendapatan per kapita pada 26 Provinsi 2010-2015	45
6	Hasil estimasi parameter persamaan belanja modal (BMODAL) pada 26 Provinsi di Indonesia 2010-2015	47
7	Hasil estimasi parameter persamaan sisa lebih pembiayaan anggaran daerah pada 26 Provinsi di Indonesia 2010-2015	48
8	Hasil estimasi parameter persamaan realisasi penerimaan daerah pada 26 Provinsi 2010-2014	49
9	Hasil estimasi parameter persamaan surplus pada 26 Provinsi 2010-2014	50
10	Hasil estimasi parameter persamaan PMD pada 26 Provinsi di Indonesia 2010-2015	51
11	Hasil estimasi parameter persamaan dividen dari 26 BPD di Indonesia 2010-2015	52
12	Hasil estimasi parameter persamaan laba bank pada 26 BPD di Indonesia 2010-2015	55
13	Hasil validasi model Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Pembangunan Daerah	57
14	Hasil simulasi menambah penyertaan modal sebesar 3 Persen dan 10%	58
15	Hasil simulasi kenaikan belanja pegawai sebesar 3 persen dan 10 persen	59
16	Hasil simulasi kenaikan retribusi daerah sebesar 3 Persen dan 10 Persen	60
17	Hasil simulasi kombinasi kenaikan penyertaan modal dan belanja pegawai masing-masing 3% dan 10% dan kebalikannya 10% dan 3%	61
18	Hasil simulasi kombinasi kenaikan belanja pegawai bank dan kenaikan retribusi daerah masing-masing sebesar 3% dan 10% dan kebalikannya 10% dan 3%	62
19	Hasil simulasi kombinasi kenaikan penyertaan modal daerah dan retribusi daerah masing-masing 3% dan 10% dan kebalikannya 3% dan 10%	63
20	Hasil simulasi kombinasi kenaikan penyertaan modal dan belanja pegawai serta retribusi daerah 3%, 3% dan 10% sebaliknya 10%, 3% dan 3%	65

DAFTAR GAMBAR

1	Dana Belum Digunakan (Idle) Pemerintah Daerah di Perbankan	
2	Per Bulan Desember 2013 & Tren Data Agregat Defisit/Surplus APBD (dalam Milyar Rupiah)	2
3	Rata-rata Agregat Nilai Penyertaan Modal Daerah di 28 Provinsi (dalam persen)	3
4	Perkembangan Teori Investasi	10
5	Kerangka Berpikir Model Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	30
6	Perbandingan rata-rata besaran penyertaan modal 26 Pemerintah Provinsi terhadap total rata-rata penyertaan modal (milyar rupiah) tahun 2010-2015	36
7	Persentase Rata-rata PAD Terhadap Rata-rata Realisasi Pendapatan Tahun 2010-2015	39
8	Persentase Rata-rata Belanja Operasional Terhadap Total Realisasi Belanja Tahun 2010-2015	39
9	Rata-rata pendapatan bank BPD tahun 2010-2015	41



DAFTAR SINGKATAN DAN ISTILAH

A	
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AFTA	: <i>Asean Free Trade Area</i>
APT	: <i>Arbitrage Pricing Theory</i>
APEC	: <i>Asia- Pasific Economic Cooperation</i>
ANOVA	: <i>Analisis Of Varian</i>
ALM	: <i>Asset and Liability Management</i>
ATMR	: Aset Tertimbang Menurut Resiko
B	
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BIAYATERIMA	: Penerimaan Pembiayaan
BIYAKELUAR	: Pengeluaran Pembiayaan
BMODAL	: Belanja Modal
BOPO	: Biaya Operasional terhadap pendapatan operasional
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPS	: Badan Pusat Statistik
B_PEGAWAI	: Belanja Pegawai
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
C	
C	: <i>Consumtion</i>
CAR	: <i>Capital Adequency Ratio</i>
CAMEL	: <i>Capital, Asset, Quality, Management, Earning dan Liquity</i>
CAPM	: <i>Capital Asset Pricing Model</i>
CCAPM	: <i>Consumption Capital Asset Pricing Model</i>
CR4	: Consentarsion Ratio Empat
D	
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DBH_PAJAK	: Dana Bagi Hasil Pajak
DBHSDA	: Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
DER	: <i>Debt Equity Ratio</i>
DIPO	: <i>Dummy Initial Public Offering</i> (Perusahaan yang telah Go Publik)
DIY	: Daerah Istimewa Yogyakarta
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DPK	: Dana Pihak Ketiga
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSARBISB	: Dummy Sasaran Bisnis Bank BPD



E	
EBIT	: Earning Before Interest and Tax
G	
G	: <i>Government</i>
GCG	: <i>Good Corporate Government</i>
GNP	: <i>Gross National Product</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
H	
HDEV	: Hasil Kekayaan Daerah Yang dipisahkan tanpa dividen dari Bank BPD
I	
I	: <i>Invesment</i>
IMBANG	: <i>Dana Perimbangan</i>
IPO	: <i>Initial Public Offering</i>
I_SWASTA	: <i>Investasi Swasta</i>
J	
JABAR	: <i>Jawa Barat</i>
JATIM	: <i>Jawa Timur</i>
JATENG	: <i>Jawa Tengah</i>
K	
KALBAR	: <i>Kalimantan Barat</i>
KALSEL	: <i>Kalimantan Selatan</i>
KALTENG	: <i>Kalimantan Tengah</i>
KAP	: <i>Kualitas Aktiva Produktif</i>
L	
LAINPAD	: <i>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah</i>
LDR	: <i>Loan to Deficit Ratio</i>
LKPD	: <i>Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</i>
LSILPA	: <i>Lag Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran</i>
N	
NAFTA	: <i>Nort American Free Trade Agreement</i>
NYSE	: <i>New York Stock Exchange</i>
NPL	: <i>Non Performing Loan</i>
NSW	: <i>New South Wales</i>
NTB	: <i>Nusa Tenggara Barat</i>
NTT	: <i>Nusa Tenggara Timur</i>
M	
M	: <i>Import</i>
MEA	: <i>Masyarakat Ekonomi Asia</i>
MTN	: <i>Medium Term Note</i>



P
 PAD : Pendapatan Asli Daerah
 PAJAKD : Pajak Daerah
 PDRB : Produk Domestik Regional Bruto
 PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum
 PDB : Produk Domestik Bruto
 PE : *Public Entrepreneurship*
 PMA : Penanaman Modal Asing
 PMD : Penyertaan Modal Daerah
 PMDN : Penanaman Modal Dalam Negeri
 PKAPITA : Pendapatan Per Kapita
 PROV : Provinsi

R
 RAROC : *Risk Adjustment Return on Capital*
 R_BLJ : Realisasi Belanja
 RETRID : Retribusi Daerah
 ROE : *Return Of Equity*
 ROA : *Return Of Asset*
 ROC : *Return Of Capital*
 RPENPD : Realisasi Pendapatan Daerah

S
 SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan
 SILPA : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
 SUN : Surat Utang Negara
 SURPL : Surplus
 SULTRA : Sulawesi Tenggara
 SULTENG : Sulawesi Tengah
 SULUT : Sulawesi Utara
 SULSEL : Sulawesi Selatan
 SUMSEL : Sumatera Selatan
 SUMBAR : Sumatera Barat
 SUMUT : Sumatera Utara

U
 UMKM : Usaha Mikro Kecil Menengah
 UN : *Unemployment*
 UNDP : *United Nation Development Programe*
 UU : Undang-Undang

X
 X : Ekspor





SB-IPB

Sekolah Bisnis - Institut Pertanian Bogor

© Hak Cipta Milik IPB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencatatkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah; dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan IPB. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apa pun tanpa izin IPB